

KIPRAH SUDHARMONO DALAM SEJARAH GOLONGAN KARYA (1983-1988)

Oleh:
Adisthy Regina dan Suwirta¹

ABSTRACT

The main problem discussed in this study, "how was the role of Sudharmono in leading the Golongan Karya (1983-1988)". The research method used was the historical method including heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. Based on result's study, Sudharmono was Soeharto's right-hand man in New Order's era. This proven with the candidacy of Sudharmono as Golkar Chairman from 1983-1988, that was directly elected by Soeharto. Sudharmono was a figure who contributed to Golkar's progress in the New Order (1983-1988). Sudharmono was a Chairman from civilian, however, he could take Golkar to maximum advancement. These advancements were made because Sudharmono had taken formal and non-formal education with tremendously well. His great accomplishments made Sudharmono become a figure who could work more. Sudharmono has made Golkar better through his policy called Tri Sukses Golkar, such as Sukses Konsolidasi, Sukses Repelita IV and Sukses Pemilu 1987, as well as General Assembly of MPR 1988. The policy that made by Sudharmono have connectedness because if consolidation succeeded, it would affect success for other policy namely Repelita and the General Election of 1987. A great victory of Golkar in General Election of 1987, had succeeded made Sudharmono became the Vice President of the Republic of Indonesia in 1988. This accomplishment became a threat to Soeharto because he could replace him from the presidency position. To prevent such action, Soeharto forbade Sudharmono to proposed back to became Golkar's Chairman for 1988-1993 period.

Keywords: Golkar, Pemilu 1987, Sudharmono, Tri Sukses Golkar, Wakil Presiden RI

PENDAHULUAN

Pada masa Orde Baru, pemerintahan dipimpin oleh Soeharto. Dimana dalam masa kepemimpinannya Soeharto menerapkan Asas Tunggal yaitu hanya Ideologi Pancasila saja yang boleh berkembang. Selain itu, Soeharto membuat tiga kekuatan negara yaitu, ABRI, Birokrasi dan Golongan Karya (Golkar) (Rahmah, 2016, hlm. 1).

Indonesia didominasi oleh kelompok militer karena Soeharto menerapkan Dwi Fungsi ABRI dalam pemerintahan Indonesia. Hal ini dibuktikan dalam pencalonan Ketua Umum Golkar pada masa Orde Baru, dimana pemimpin Golkar merupakan orang-orang yang berasal dari kalangan militer. Namun tidak pada masa periode 1983-1988, pada periode ini Golkar dipimpin oleh Sudharmono yang

¹Alin Novandini adalah mahasiswa pada Departemen Pendidikan Sejarah FPIPS UPI, Suwirta adalah dosen pembimbing I. Penulis dapat dihubungi di nomor 085720064055 / alamat email : alinnovandini@gmail.com

berasal dari kalangan sipil. Meskipun dari kalangan sipil, Sudharmono pernah masuk sebagai anggota militer dengan pangkat Letnan Jenderal. Sudharmono dipilih oleh Soeharto karena merupakan orang terbaik keduanya serta mengetahui pemikiran Presiden Soeharto (Suryadinata, 1992, hlm. 121).

Sudharmono dipilih menjadi Ketua Umum Golkar pada Musyawarah Nasional (Munas) III tahun 1983. Terpilihnya Sudharmono membuatnya mendapatkan dua jabatan, karena pada saat dipilih menjadi Ketua Umum Golkar, ia sedang menjalankan tugasnya sebagai Menteri Sekretaris Negara. Sudharmono dikenal sebagai pribadi yang efisien dan efektif dalam bekerja, serta tak pernah menonjolkan diri ke depan publik (Biro Informasi & Data, 1984, hlm. 6). Sebagai Ketua Umum Golkar (1983-1988), Sudharmono membuat kebijakan yaitu Program Tri Sukses Golkar yaitu Sukses Konsolidasi, Sukses Repelita IV dan Sukses Pemilu 1987 serta Sidang Umum MPR 1988 (Sudharmono, 1997, hlm. 321-322). Dari ketiga sukses tersebut, Sukses Konsolidasi memiliki pengaruh besar terhadap sukses yang lainnya. Karena apabila konsolidasi sukses maka akan menyelesaikan pembangunan serta Pemilihan Umum 1987. Dengan kebijakan tersebut, Golkar dapat meraih kemenangan pada Pemilihan Umum 1987 yang diselenggarakan pada tanggal 23 April 1987 (Rohmawai, 2016, hlm. 314).

Tahun 1983-1988 adalah jangka waktu yang dipilih. Pada tahun 1983 Sudharmono dipilih menjadi Ketua Umum Golkar dan Golkar pertama kali dipimpin oleh seseorang dari kalangan sipil. Pada tahun tersebutlah dibuat Kebijakan

Repelita IV, sehingga Golkar pada masa tersebut dapat ikut menyelesaikan pembangunan. Dipilihnya tahun 1988 sebagai batasan tahun karena pada tahun inilah Sudharmono mengakhiri jabatannya dan beralih sebagai Wakil Presiden mendampingi Soeharto yang menjabat kembali menjadi Presiden.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep kepemimpinan yang merupakan proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya (Rivai & Mulyadi, 2011, hlm. 2). Kepemimpinan memiliki tipe-tipe tersendiri, salah satunya Tipe Kepemimpinan Demokratik yang merupakan tipe Sudharmono sebagai pemimpin Golkar (1983-1988).

METODE PENELITIAN

Dalam mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan judul skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sejarah sebagai metode penelitiannya. Metode sejarah merupakan proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (Gottschalk, 1986, hlm. 36). Dalam penulisan ini, data-data digunakan berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Melalui metode sejarah, data-data menyangkut peristiwa masa lampau baik itu berupa rekaman maupun peninggalan dapat dijadikan sebagai sumber sejarah yang dapat berguna untuk mengumpulkan informasi tentang berbagai peristiwa yang pernah terjadi (Ismaun, 2005, hlm. 35).

Penulisan sejarah mengenai kiprah Sudharmono ini dilakukan dalam berbagai langkah yang dikembangkan

ke dalam tiga pembahasan, diantaranya yaitu persiapan penelitian, pelaksanaan penelitian, dan laporan penelitian. Dalam persiapan penelitian ini dibagi ke dalam tiga pembahasan diantaranya adalah penentuan dan pengajuan topik penelitian, penyusunan rancangan penelitian, dan proses bimbingan/konsultasi. Setelah dilakukan persiapan penelitian, dilakukanlah pelaksanaan penelitian. Dalam tahapan ini, penulis melakukan langkah-langkah penelitian yang sesuai dengan metode penelitian sejarah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Adapun metode penelitian sejarah yang digunakan penulis adalah metode yang dikemukakan oleh Ismaun (2005, hlm. 34) yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

Dalam tahap heuristik, penulis mengumpulkan data yang mendukung penulis dalam memecahkan pokok permasalahan yang ada. Dalam tahap ini, penulis melakukan pencarian sumber dari perpustakaan di Bandung dan Jakarta, serta mengunjungi website yang berhubungan dengan topik penulis. Tahap selanjutnya adalah tahap kritik yang erat kaitannya dengan mencari kebenaran (Sjamsuddin, 1996, hlm. 118). Tahap kritik ini terbagi menjadi dua, yaitu kritik internal dan kritik eksternal. Tahap kritik ini dilakukan untuk mengukur keotentikan dan kelayakan sumber yang penulisan digunakan dalam penelitian sejarah ini. Tahap selanjutnya adalah tahap interpretasi sebagai tindak lanjut dari tahap kritik. Dalam tahap ini penulis melakukan analisis terhadap sumber-sumber yang telah dipilih dan diajukan sebagai sumber penunjang dalam proses penelitian. Tahap interpretasi ini dilakukan dengan cara mengolah, menyusun dan menafsirkan

fakta-fakta yang teruji kebenarannya yang kemudian dirangkaikan dan dihubungkan satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan (Ismaun, 1992, hlm. 72). Tahap akhir yang dilakukan adalah historiografi, yaitu penggunaan pikiran-pikiran kritis dan analisis sehingga menghasilkan suatu sintesis dari seluruh hasil penelitian dan penemuan dalam suatu penelitian utuh (Sjamsuddin, 2007, hlm. 156). Setelah dilakukan pelaksanaan penelitian, mulailah penulis membuat laporan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sudharmono merupakan seorang yang mempunyai perawakan tinggi semampai, rambutnya yang sudah dua warna disisir lurus ke belakang, agak berombak. Jika berbicara, aksan Jawanya masih terdengar cukup nyata. Sudharmono merupakan seorang yang serius disiplin, korek, namun mudah tersenyum dan tertawa (Biro Informasi & Data, 1984, hlm. 12). Sudharmono dilahirkan di kota kecil atau Desa Cerme, Ibu Kota Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Jawa timur pada tanggal 12 Maret 1927. Sudharmono merupakan anak yatim piatu mulai dari berusia 3 tahun, hal ini dikarenakan ibunya wafat ketika sedang melahirkan adik Sudharmono. Sepeninggalan ibunya, ayah Sudharmono pun jatuh sakit. Meskipun telah memperoleh perawatan di Surabaya, namun tidak dapat tertolong sehingga wafat di tahun yang sama (Sudharmono, 1997, hlm. 59).

Sejak kecil, Sudharmono dan kakanya tinggal di Rembang bersama neneknya. Kota Rembang yang terletak di Pantai Utara Laut Jawa, pernah menjadi ibu

Kota Keresidenan Jepara-Rembang. Pada saat Sudharmono datang ke Rembang pada tahun 1935, Ibu Kota Keresidenan sudah berada di Pati, dan Rembang hanya merupakan Kota Kabupaten. Rembang sendiri dapat disebut sebagai kota tua dan tenang (Sudharmono, 1993, hlm. 52). Di Rembang inilah Sudharmono memulai kembali pendidikan hingga berhasil menjadi seorang yang penting pada masa Orde Baru. Sudharmono dan kakaknya Siti tinggal bersama Mbah Putri, nenek dari ibunya yang merupakan janda Asisten Wedana Balen di Rembang. Di kota inilah Sudharmono mendapat pendidikan Sekolah Dasar Belanda, HIS dari kelas 1 sampai kelas 7, sampai datangnya tentara Jepang ke Indonesia dalam Perang Dunia Kedua (Sudharmono, 1997, hlm. 59).

Di sekolah HIS tersebut, ternyata guru kelasnya menilai Sudharmono terlalu pandai, sehingga kenaikan kelasnya tidak ke kelas II, melainkan langsung ke kelas III. SMP-SMA ditempuh di Semarang karena mengikuti keluarga. Di Sekolah Menengah Pertama ini, Sudharmono mengambil jurusan B (Ilmu Pasti). Sementara di SMA-nya, Sudharmono tidak sempat melanjutkan sekolahnya dikarenakan pada saat itu Indonesia mengalami Perang Kemerdekaan. Maka dari itu, Sudharmono mengikuti perang. Setelah perang, ia memutuskan tetap berkarier dalam bidang militer, dan tahun 1950 pun masuk Pusat Pendidikan Perwira AD, tatkala usianya 23 tahun. Di sana ia mulai ditempa sebagai militer profesional sembari berusaha merampungkan pendidikan umumnya di SMA yang terputus (Biro Informasi & Data, 1984, hlm. 13). Setelah berhasil di SMA, Sudharmono melanjutkan pendidikannya dengan memasuki Akademi Hukum Militer

pada tahun 1956, kemudian Perguruan Tinggi Hukum Militer dan berijazah SH pada tahun 1962. Setelah lulus dari PTHM (Perguruan Tinggi Hukum Militer), Sudharmono melanjutkan perjalanannya menjadi Jaksa Penuntut Umum dan Oditur Militer dari Koti (Kusumaatmadja, 1997, hlm. 476).

Awal kiprah Sudharmono dalam dunia politik diawali pada pembentukan susunan Kabinet Pembangunan IV oleh Soeharto pada 16 Maret 1983 yang bertempat di Istana Merdeka (Team Dokumentasi Presiden RI, 2003, hlm. 5). Awal kiprah Sudharmono terjun ke dunia politik adalah pada saat pengangkatan menjadi Sekretaris Presidium Kabinet pada tahun 1966. Setelah menjadi Sekretaris Presidium Kabinet, Sudharmono diangkat menjadi Sekretaris Kabinet. Hal ini dikarenakan Soeharto diangkat menjadi Pejabat Presiden serta menjabat beberapa jabatan sekaligus, seperti Pejabat Presiden, Ketua Umum Presidium Kabinet, Menteri Utama Hankam, Menteri Hankam, Pangkopkamtib, dan pengemban Supersemar. Banyaknya jabatan yang Soeharto raih, membuat Soeharto mengeluarkan keputusan untuk mengubah dan menyesuaikan susunan dalam Kabinet Ampera dengan cara meniadakan beberapa jabatan seperti Presidium Kabinet, Menteri Utama, serta Sekretaris Presidium Kabinet yang dilebur dalam Sekretariat Kabinet sebagai bagian dari Sekretaris Negara (Sudharmono, 1997, hlm. 178-195). Maka dari itu, Sudharmono menjadi Sekretariat Negara yang memberikan perhatian kepada Biro Hukum dan Perundang-undangan.

Keberhasilan Sudharmono ini membuat adanya peningkatan kedudukan,

dari Sekretaris Negara menjadi Menteri Negara/Menteri Sekretaris Republik Indonesia. Melihat kemajuan Sudharmono dalam dunia perpolitikan, membuat Sudharmono dicalonkan sebagai Ketua Umum Golkar (Kusumaatmadja, 1997, hlm. 230). Soeharto memilih anggota berdasarkan kedekatannya, begitu pun Sudharmono yang dikenal dekat dan dipercayai oleh Soeharto. Selain itu, Soeharto pun ikut serta dalam pemilihan Ketua Umum Golkar. Sudharmono sendiri menjadi Ketua Umum Golkar dengan cara ditunjuk langsung oleh Soeharto dengan didukung oleh tokoh-tokoh lainnya. Pemilihan Ketua Umum Golkar ini pun dilaksanakan pada Musyawarah Nasional (Munas) Ke-3 bertempat di Manggala Wanabhakti, Jakarta pada Oktober 1983 yang diadakan bertepatan dengan ulang tahun Golkar yang ke-19 (Team Dokumentasi Presiden RI, 2003, hlm. 68).

Munas III Golkar 1983 ini merupakan obyek pengamatan yang menarik. Bukan hanya karena jauh dari pola “tinggal ketuk palu dan setuju” saja, melainkan juga karena diduga akan terjadi perubahan mendasar dalam orientasi kehidupan politik di Indonesia. Amir Murtono pasti harus meninggalkan posnya sebagai Ketua Umum. Sebagai ganti, muncul nama Sudharmono yang cukup mengejutkan, karena tentu ada apa-apanya sampai harus diterjunkan tokoh “super kakap” seperti Menteri Setneg. Ditambah semakin kaburnya peranan tokoh “super kakap” lain, Ali Murtopo, dalam kehidupan internal Golkar, setelah lebih sepuluh tahun “menguasai medan percaturan politiknya”, membuat tambah menarik pengamatan atas kemungkinan-kemungkinan apa saja yang akan terjadi

selama dan setelah Munas. Bahwa seorang dari kelas “super kakap” terjun langsung memimpin organisasi, jelas menunjukkan akan berubahnya pola pengambilan keputusan dalam Golkar. Jika selama ini DPP Golkar lebih bersifat pelaksana dan keputusan lebih berat ke Dewan Pembina, keadaannya tentu akan berlainan. Dewan Pembina memang masih akan menentukan hal-hal yang bersifat umum dan garis besar, namun keputusan operasional yang bersifat strategis jelas akan berpindah ke DPP, dengan duduknya orang sekaliber Sudharmono dalam kedudukan Ketua Umum (Biro Informasi dan Data, 1984, hlm. 141).

Di balik banyak orang yang mendukung Sudharmono untuk menjadi Ketua Umum Golkar, namun ada pula yang kurang setuju atas dicalonkannya Sudharmono. Karena meskipun Sudharmono merupakan seorang purnawirawan berpangkat Letjen, ia tidak pernah diterima kalangan militer sebagai anggota penuh. Latar belakangnya sebagai alumnus Akademi Hukum Militer dan bertindak sebagai jaksa militer yang jadi alasannya. Tidak seperti sebagian besar pemimpin militer yang merupakan jenderal lapangan, Sudharmono jenderal staf tanpa pengalaman tempur. Namun dibandingkan dengan pihak tidak setuju ternyata lebih banyak pihak yang setuju Sudharmono menjadi Ketua Umum Golkar sehingga Sudharmono dapat diangkat menjadi Ketua Umum Golkar pada Munas III 1983 (Kasenda, 2013, hlm. 164). Keberhasilan Sudharmono saat terpilih menjadi Ketua Umum Golkar ini kemudian menjalankan segala tugasnya. Sudharmono bertekad bahwa Golkar akan memperjuangkan terwujudnya pemerintahan yang bersih dan beribawa.

Untuk itu Sudharmono mengharapkan agar pimpinan dan kader-kader Golkar di tingkat pusat maupun daerah yang melaksanakan tekad dan kemauan bersama dengan semangat yang tinggi. Maka dari itu, Sudharmono melakukan serangkaian program diantaranya Tri Sukses Golkar (Sukses Konsolidasi, Sukses Repelita IV, Sukses Pemilu 1987 dan Sidang Umum MPR 1988). Ketiga sukses tersebut saling berkaitan karena sukses yang satu mendukung sukses yang lain (Kusumaatmadja, 1997, hlm. 101). Sebagai Ketua Umum Golkar, Sudharmono merupakan sosok pemimpin yang termasuk ke dalam tipe kepemimpinan demokratik, karena ia merupakan sosok pemimpin yang selalu memperhatikan kebutuhan kelompoknya dan mempertimbangkan kesanggupan kelompok dalam mengerjakan tugas serta menerima masukan dan saran dari bawahannya. Hal ini dibuktikan pada saat pengesahan kebijakan Sudharmono saat menjadi Ketua Umum Golkar. Sudharmono selalu menerima saran dalam bekerja, selain itu merupakan sosok yang ramah kepada sesama rekannya sehingga tidak seperti majikan dengan bawahannya.

Selain Program Tri Sukses, Sudharmono berusaha memasyarakatkan sikap dan identitas Golkar melalui Ikrar Golkar Pancabhakti yang sudah dimiliki Golkar sejak semula disamping doktrin karya dan kekaryaan. Dari ketiga Program Tri Sukses Golkar, yang paling mempengaruhi adalah sukses Konsolidasi, di mana apabila konsolidasi sukses dilakukan maka akan menyukseskan pula kedua sukses yang lainnya, yaitu sukses Repelita IV dan Pemilu 1987 serta Sidang Umum MPR 1988. Sebaliknya, apabila

konsolidasi gagal dilakukan maka Repelita IV dan Pemilu akan gagal dilakukan. Dalam merealisasikan kebijakannya ada beberapa langkah yang dilakukan. Dalam sukses konsolidasi, Golkar mempunyai peranan strategis maupun taktis bagi pelaksanaan program umum Kaderisasi Golkar. Golkar perlu meningkatkan pengkaderan, lebih mengharmoniskan hubungan kerja antara Golkar dan organisasi-organisasi pendukungnya. Dalam hal ini, Golkar mempunyai rasa pengabdian dan tanggung jawab yang sebesar-besarnya kepada rakyat, tanggap terhadap aspirasi masyarakat, mempunyai kepemimpinan yang baik dan mempunyai kemampuan berdiri sendiri (Noerijathi, 1988, hlm. 172).

Yang harus disiapkan sebagai bahan untuk kaderisasi, yaitu harus disiapkan tenaga-tenaga untuk penataran/ pendidikan kader, dan seterusnya. Setelah diadakan pembahasan beberapa kali di dalam rapat-rapat DPP dan dikonsultasikan dengan Ketua Dewan Pembina, diputuskan untuk menyiapkan dua jenis kader. Pertama, kader penggerak teritorial pedesaan (karakterdes). Kedua, kader penggerak fungsional, seperti pemuda, wanita, guru, ulama, tenaga kerja, yang disingkat karaknal. Pelaksanaannya akan didahulukan dengan pendidikan karakterdes di seluruh desa-desa di Indonesia. Ditentukan sebagai sasaran jumlah karakterdes sebanyak 10% dari jumlah pemilih dari setiap desa. Setelah itu, segeralah disiapkan petunjuk-petunjuk pelaksanaannya. Hal penting yang menjamin suksesnya program ini adalah adanya bahan pendidikan/penataran kader. Sejak semula sudah diterima prinsip, kader yang akan dibentuk ialah

kader yang berwawasan luas. Ia bukan hanya kader organisasi Golkar, melainkan juga harus jadi kader bangsa, kader Pancasila dan dengan sendirinya juga kader Pembangunan (Sudharmono, 1997, hlm. 337).

Berbagai upaya untuk membuat Golkar lebih independen dengan menjaga jarak terhadap unsur militer telah dirintis sejak kepemimpinan Sudharmono yang ingin menjadikan Golkar sebagai organisasi kader yang berakar dan teradministrasi dengan baik (Kholil, 2009, hlm. 155). Selain melakukan konsolidasi kepada wilayah-wilayah, konsolidasi pun dilakukan dalam dunia pendidikan. PGRI sebagai wadah profesional guru/pendidik yang perlu terus menerus mengadakan konsolidasi yang terarah. Konsolidasi pun dilakukan dalam bidang keagamaan. Melalui kaderisasi, peranan pemuka agama ditingkatkan dari sekedar mengajarkan dan mendidik masalah-masalah keagamaan, menjadi pencetak manusia Indonesia yang Pancasila, pemersatu serta berjiwa pembangunan (Bhayansyor, 1989, hlm. 63). Selain keagamaan, dalam rangka menyukseskan konsolidasi yaitu melalui kader-kader wanita. Himpunan Wanita Karya merupakan organisasi wanita Indonesia yang beraspirasi kepada Golongan Karya. Peranan wanita dalam menyukseskan Tri Sukses itu sangatlah penting karena banyak bidang kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan yang lebih cocok dan lebih efektif apabila ditangani oleh kaum wanita (Noerijathi, 1988, hlm. 77).

Dalam mendapatkan kader-kader atau anggota baru Golkar, Sudharmono menempatkan kata “sukarela” dalam rumusan Golongan Karya yang bersifat

perorangan dengan stelsel aktif, semata-mata untuk menegaskan bahwa tidak ada paksaan untuk menjadi anggota Golkar. Latar belakang penempatan kata “sukarela” dalam keorganisasian Golongan Karya yaitu dengan perspektif terhadap seseorang yang memilih menjadi anggota suatu organisasi yang tentu saja sudah mempunyai motivasi untuk menjadi seorang yang masuk ke dalam suatu organisasi (Biro Informasi & Data, 1984, hlm. 8).

Dalam pelaksanaan sukses Repelita IV, Golkar akan berusaha mendorong usaha pembangunan Repelita IV untuk menciptakan kerangka landasan tinggal landas menuju masyarakat adil makmur dengan memberikan dukungan kreatif melalui kegiatan masyarakat yang berswadaya dan berswakarsa. Pembangunan Nasional harus dilaksanakan dengan wawasan “pembangunan manusia seutuhnya” serta secara merata, mencakup seluruh lapisan masyarakat (Biro Informasi & Data, 1984, hlm. 4). Untuk mewujudkan pembangunan tersebut, selain melakukan kaderisasi generasi muda khususnya bagi AMPI (Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia), Golkar pun merumuskan peranan generasi muda dalam keikutsertaannya menyukseskan pembangunan nasional pada umumnya dan Pelita VI pada khususnya. Selain itu, dalam melaksanakan program-programnya, Golkar menaruh perhatian besar pada masalah pendidikan dan ketenagakerjaan, karena keduanya bersifat strategis untuk menunjang kerangka landasan dalam Pelita IV.

Masalah pendidikan mendapat perhatian sungguh-sungguh karena Golkar ingin melaksanakan amanat yang tertuang

dalam Pembukaan UUD 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka dari itu, Golkar menegaskan bahwa melalui bidang pendidikan harus dikembangkan sumber daya manusia secara utuh yang berorientasi pada pembangunan serta secara adil dan merata mencakup segenap lapisan masyarakat. Selain pendidikan, Sudharmono menegaskan bahwa masalah ketenagakerjaan perlu ditangani dengan sungguh-sungguh sejalan dengan usaha memecahkan masalah penciptaan lapangan kerja yang dikaitkan dengan masalah kependudukan. Apabila masalah ketenagakerjaan dapat dipecahkan tentunya merupakan sumbangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat yang juga menjadi cita-cita perjuangan Golkar (Biro Informasi & Data, 1984, hlm. 30).

Selain itu, Sudharmono meresmikan penggunaan kantor dan studio Radio Ramako FM 106.15 Stereo di Kebayoran Baru, Jakarta. Menurut Sudharmono, radio siaran swasta niaga harus ditingkatkan perannya, salah satunya adalah membangkitkan semangat masyarakat dalam pembangunan. Radio siaran swasta sebagai media massa ini memiliki 5 tugas utama dimana didalamnya terdapat media siaran elektronika. 5 tugas tersebut diantaranya, menggelorakan semangat pengabdian dan perjuangan bangsa; memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional; mempertebal rasa tanggungjawab dan disiplin nasional; memasyarakatkan budaya dan kepribadian Indonesia; dan menggairahkan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan (Bhayhansyor, 1989, hlm. 52). Dalam menyukseskan Repelita IV, Sudharmono merumuskan Temu Karya Nasional Bidang Hukum. Temu Karya ini diselenggarakan oleh DPP Golkar dalam

rangka meningkatkan partisipasi Golkar dalam menyukseskan pembangunan, khususnya dalam bidang hukum untuk Repelita IV ini.

Setelah sukses konsolidasi dan sukses Repelita IV dilakukan, maka dilakukan pula Sukses Pemilu 1987 dan Sidang Umum MPR 1988. Dalam menyukseskan program tersebut, Golkar perlu belajar dari pengalaman-pengalaman Pemilu sebelumnya untuk melakukan persiapan sedini mungkin. Khusus bagi Daerah Jakarta Raya persiapan-persiapan itu sangat perlu dilakukan sedini mungkin, agar prestasi Golkar DKI (Ibu Kota Negara RI) yang dapat dicapai dalam Pemilu terakhir ini tetap dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan (Noerijathi, 1988, hlm. 62). Dalam mempersiapkan pemilihan umum 1987, Golkar telah melakukan berbagai macam usaha sejak dilantikannya Sudharmono menjadi Ketua Umum Golkar. Meskipun masih terlalu dini mengatakan bahwa Golkar berkembang menjadi partai kader yang sebenarnya. Tetapi Golkar berhasil merekrut sebagian besar tokoh masyarakat Indonesia sejak 1984 (Kasenda, 2013, hlm. 157).

Dalam menyiapkan kemenangan Golkar dalam pemilu 1987, Sudharmono merancang strategi, yaitu melakukan penyusunan daftar calon untuk pemilu 1987. Penyusunan ini mendapatkan perhatian khusus agar hasilnya dapat diterima dengan baik oleh seluruh lapisan jajaran keluarga besar Golkar dan tidak meninggalkan gejolak internal. Pada prinsipnya, daftar calon untuk DPR itu harus disusun dan ditetapkan oleh DPP. Daftar calon untuk DPRD tingkat I oleh DPD tingkat I dan daftar calon DPRD tingkat II oleh DPD tingkat II (Sudharmono, 1997, hlm. 362-263).

Strategi utama Golkar dalam pemilu-pemilu Orde Baru ialah memobilisasi pejabat-pejabat pemerintah, yang pada gilirannya digunakan untuk memobilisasi para pendukung. Pejabat-pejabat daerah tingkat propinsi, kotamadya, dan kecamatan menerapkan tekanan kepada kepala-kepala desa untuk mengumpulkan suara untuk Golkar, hal ini dilakukan sebagai upaya kemenangan Golkar dalam setiap pemilu (Liddle, 1992, hlm. 91). Selain itu, dalam usaha mencapai kemenangan dalam pemilu 1987, maka Golkar berusaha menarik simpati rakyat pemilih agar mereka menaruh tanda gambar Golkar dalam pemilu 1987, maka salah satu kegiatan yang harus dilaksanakan adalah melaksanakan kampanye pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kampanye ini dilakukan dikarenakan kondisi sosial dimana dapat diduga bahwa kebanyakan masyarakat yang padat dan bersifat urban ini lebih peka terhadap isu yang diangkat oleh para juru kampanye. Selain itu kondisi kehidupan yang keras, masyarakat perkotaan lebih menyadari lingkungan sosial dan politik mereka juga lebih merasakan berbagai bentuk kesenjangan sosial-ekonomi-politik yang berlangsung. Masyarakat lebih mudah hanyut dalam kampanye dan mudah terangsang untuk melampiaskan kekecewaan karena jurang yang semakin melebar antara aspirasi yang meningkat dengan pemenuhan kebutuhan yang semakin sukar diupayakan (Sanit, 2011, hlm. 90).

Selain melakukan kampanye, Sudharmono dalam memimpin Golkar adalah menyusun daftar calon untuk Pemilu 1987. Semula Sudharmono memberikan perhatian khusus agar tugas ini dapat diselesaikan dengan sebaik-

baiknya, agar hasilnya (susunan daftar calon) dapat diterima dengan baik oleh seluruh lapisan jajaran keluarga besar Golkar sehingga tidak menimbulkan gejala internal (Sudharmono, 1997, hlm. 362-363). Di dalam strateginya yang baru, Golkar memberikan peluang kepada bagi kaum wanita dan calon-calon di bawah usia 40 tahun. Meningkatkan jumlah wanita dan calon-calon berusia muda dalam daftar caleg Golkar, dimaksudkan untuk menarik dukungan dari pemilih wanita dan kaum muda yang merupakan 20% dari jumlah populasi pemilih. Dalam pemilu 1987 ini, Golkar harus dipastikan menang dalam pemilu. Sebagai partai pemerintah, Golkar dapat dikatakan sangat beruntung karena memilih saluran-saluran dan fasilitas-fasilitas resmi (Kholil, 2009, hlm. 132).

Dalam strategi Golkar dalam Pemilu 1987 terdapat sasaran tambahan yang ingin dicapai oleh Golkar, khususnya agar daerah-daerah yang belum mencapai mayoritas tunggal, yaitu Jakarta Raya dan Daerah Istimewa Aceh dapat mencapai mayoritas tunggal (di atas 50% suara). Maka dengan semangat dan jiwa proklamasi 1945, Golkar dapat memenangkan pemilu secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya (8 bulan) dengan memperoleh suara sebanyak 52% (Kusumaatmadja, 1997, hlm. 105).

Selain itu, menjelang pemilu 1987, pemerintah memperoleh beberapa keberhasilan yang cukup menonjol misalnya mampu mencukupi kebutuhan beras sendiri, sehingga di mata rakyat ada kesan bahwa pemerintah benar-benar menyejahterakan rakyat. Hal inilah yang akan semakin menyokong kemenangan Golkar (Wiharyanto, 2011, hlm. 187). Dalam melakukan upaya tersebut,

menteri-menteri berkampanye untuk Golkar jauh sebelum masa kampanye dimulai. Mereka menggunakan jabatan-jabatan resmi mereka untuk memasang listrik dan air minum ke desa-desa, meresmikan masjid-masjid baru dan memberikan sumbangan ke pasantren-pasantren untuk mengesankan penduduk pedesaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur bahwa hanya pemerintah Golkar yang mampu memajukan pembangunan desa dan memberi mereka keuntungan (Kholil, 2009, hlm. 133). Golkar pun melakukan kampanye di berbagai daerah, yaitu ke Sumatera Utara, Aceh, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Jakarta, dan Jawa Tengah.

Pada pelaksanaan pemilu 1987, peranan tentara tidak mencolok selama berlangsungnya pemilu 1987. Beberapa pengamat pun mengatakan bahwa pada pemilu 1987 ini tentara mencoba berdiri di atas semua pihak sehingga dapat dikatakan sebagai pemilu paling netral. Absennya tentara selama masa pemilu 1987 sangat kentara di Jakarta (Kasenda, 2013, hlm. 159). Golkar memenangkan suara mayoritas seperti yang diharapkan. Ia meraih suara 73,16% dari jumlah keseluruhan, 9% lebih tinggi dibanding pemilu 1982, atau 3% lebih tinggi dari target semula. Bahkan di wilayahnya yang terkuat, Aceh meraih keberhasilan dengan memperoleh suara 51,5%. Ada beberapa alasan yang mencolok bagi keberhasilan Golkar dalam pemilu 1987, tetapi alasan yang terpenting, meskipun mirip dengan yang terjadi dalam pemilu sebelumnya, adalah peranan pemerintah dan ABRI. Dalam pemilu 1987, peranan yang dimainkan oleh ABRI dan pemerintah sangat instrumental. Selain itu, kemenangan Golkar dalam empat kali pemilu dan diterapkannya Pancasila

sebagai satu-satunya azas bagi semua organisasi massa telah menciptakan kesan bahwa Golkar menjadi sebuah partai negara dan bahwa Indonesia sedang bergeser ke arah sistem partai tunggal (Kholil, 2009, hlm. 133-134).

Tabel 1.c1
Hasil Pemilihan Umum Orde Baru

Pemilihan Orde Baru				
Hasil	1971	1977	1982	1987
Golkar	62,8%	62,1%	64,3%	73,2%
PPP	27,1	29,3	27,2	16,0
PDI	10,1	8,6	7,9	10,0
Jumlah	100,0	100,0	100,0	100,1

(Sumber: Liddle, 1992, hlm. 92)

Setahun setelah dilakukan pemilu 1987, diadakan pula Sidang Umum MPR pada tahun 1988. Sidang Umum MPR 1988 ini dilakukan untuk memilih Wakil Presiden. Maka dari itu, dalam Sidang Umum MPR 1988, penentuan calon wakil presiden itu sangatlah penting dikarenakan wakil presiden inilah yang akan menentukan posisi kuatnya Soeharto. Dengan kata lain, wakil presidenlah yang akan menjadi rekan kerja Presiden Soeharto namun tidak mempengaruhi kekuasaannya sebagai pemimpin Indonesia (Kasenda, 2013, hlm. 163).

Pengaruh Ketua Umum Golkar Sudharmono menguat ke permukaan dengan kemenangan Golkar yang luar biasa pada pemilu 1987 dan dinominasikan sebagai calon wakil presiden pada 1988 meskipun pencalonannya tidak mulus. Sudharmono merupakan calon wakil presiden yang memenuhi syarat yang diajukan oleh Presiden Soeharto. Terpilihnya Sudharmono menjadi wakil presiden menimbulkan masalah apakah pada saat bersamaan, Sudharmono boleh

menjabat sebagai Ketua Umum Golkar. Karena jika ia menjadi Ketua Umum Golkar, maka ia akan memiliki kekuasaan yang besar dan memprihatinkan kalangan oposisinya. Namun karena tidak ada ketentuan yang mengatur, secara teori Sudharmono tetap akan menjabat sebagai Ketua Umum Golongan Karya sampai Munas IV Golkar pada 20 Oktober 1988 (Suryadinata, 1992, hlm. 129-130).

Pada 10 Maret pukul 10.00, Sidang Umum MPR mengadakan pemilihan presiden. Setelah Ketua MPR mengetuk palu presiden tahun 1988-1993, Ketua akan menskors sidang untuk dilanjutkan pada siang harinya dengan acara pengumuman calon wakil presiden. Maka pada sidang siang itu melalui ketukan palu Ketua MPR, MPR mengesahkan Sudharmono sebagai Wakil Presiden (Sudharmono, 1997, hlm. 407-408). Meskipun Sudharmono dapat dikatakan sebagai seorang politik yang pandai dalam membuat strategi, namun Sudharmono memiliki kelemahan pada saat menjabat sebagai Ketua Umum Golongan Karya (1983-1988). Mengingat Sudharmono adalah seorang kepercayaan Soeharto dan terpilihnya sebagai Ketua Umum dikarenakan kekuasaan Soeharto, hal ini mengakibatkan Sudharmono merupakan seorang Ketua Umum yang tidak dapat lepas dari Soeharto. Terpilihnya Sudharmono membuat militer kecewa, pasalnya terpilihnya Sudharmono ini dapat menyingkirkan kekuatan militer di dalam tubuh Golkar. Terbukti pada saat Sudharmono menjabat, kekuatan sipil pun mulai tumbuh di dalam tubuh Golkar. Meskipun demikian, namun atas kerja kerasnya Sudharmono dapat membuktikan bahwa ia mampu mengemban tugas dengan baik pada masa Orde Baru khususnya pada saat menjabat

sebagai Ketua Umum Golongan Karya (1983-1988).

SIMPULAN

Pada masa Orde Baru, Soeharto merupakan penguasa di dalam pemerintahan Indonesia. Pada masa pemerintahannya, sejumlah orang-orang kepercayaannya menduduki kursi-kursi pemerintahan, dan satu diantaranya adalah Sudharmono. Bukti Sudharmono sebagai orang kepercayaan Soeharto adalah dengan beberapa jabatan yang diembannya, salah satunya sebagai Ketua Umum Golongan Karya (periode 1983-1988). Dalam pencalonan Ketua Umum Golkar 1983-1988, Sudharmono ditunjuk secara langsung oleh Soeharto. Pada saat menjabat sebagai Ketua Umum Golkar, Sudharmono pun tengah menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara. Sebagai seorang pemimpin, Sudharmono tergolong dalam tipe kepemimpinan demokratik. Hal ini dapat dilihat dari cara bekerja dan sifatnya saat menjabat sebagai seorang pemimpin. Ketika menjadi Ketua Umum Golkar, Sudharmono merancang kebijakan yang dinamakan Tri Sukses Golkar yakni terdiri dari Sukses Konsolidasi, Sukses Repelita IV, dan Suskes Pemilu 1987 serta Sidang Umum MPR 1988.

Berbeda dengan pemimpin sebelumnya, Sudharmono membuat kebijakan baru yaitu Program Karakterdes (Kader Penggerak Teritorial Desa) dan Karaknal (Kader Penggerak Fungsional). Kebijakan tersebut yang membuat Golkar berkembang semakin maju. Kebijakan Sudharmono ini membuat Golkar memenangkan pemilihan umum 1987 dengan suara tertinggi. Keberhasilan inilah yang membuat Sudharmono dapat terus maju hingga menjadi Wakil Presiden

mendampingi Soeharto. Namun meskipun Sudharmono menjadi seorang kepercayaan Soeharto, ia sekaligus adalah ancaman bagi Soeharto. Hal ini dikarenakan kinerja Sudharmono dengan segala prestasi dan pencapaian besarnya yang terus meningkat sehingga memperoleh banyak dukungan serta dinilai dapat menggeser posisi Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bhayhansyor, S. (1989). *Sudharmono SH: Lima Tahun Kerja Keras*. Jakarta: DPP Golkar.
- Biro Informasi & Data. (1984). *Munas III Golkar 1983 (Bagian I)*. Jakarta: CSIS.
- Biro Informasi & Data. (1984). *Munas III Golkar 1983 (bagian II)*. Jakarta: CSIS.
- Gottschalk, L. (2008). *Mengerti Sejarah* (Terjemahan Nugroho Notosusanto). Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Ismaun. (1992). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Bandung: Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS IKIP Bandung.
- Ismaun. (2005). *Pengantar Belajar Sejarah sebagai Ilmu dan Wahana Pendidikan*. Bandung: Historia Utama Pers.
- Kasenda, P. (2013). *Soeharto: Bagaimana Ia Bisa Melanggengkan Kekuasaan Selama 32 Tahun?*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Kholil, M. (2009). *Politik Islam Golkar di Era Orde Baru*. Tangerang: Gaya Media Pratama.
- Kusumaatmadja, S. dkk. (1997). *Kesan dan Kenangan dari Teman 70 Tahun H. Sudharmono, S.H.* Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Liddle, R. W. (1992). *Pemilu-Pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik*. Jakarta: LP3ES.
- Noerijathi, D.V. (1988). *Himpunan Pidato Ketua Umum DPP Golkar 1983-1988*. Jakarta: P.T. Taman Harapan Indah.
- Rahmah, G. S. (2016). *“Kiprah politik Harmoko pada masa Orde Baru melalui Analisis biografi (1983-1999)”*. Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan. Bandung: Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI Bandung.
- Rivai & Mulyadi. (2011). *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Rohmawai, Y. (2016). *“Perubahan elektabilitas partai peserta pemilu di Yogyakarta tahun 1971-1999”*. AVATARA: e-Journal Pendidikan Sejarah, 4(2): 312-319. Diakses di Bandung, 9 Desember 2017 pada jam 20.45.
- Sanit, A. (2011). *Sistem Politik Indonesia: Kestabilan, Peta Kekuatan Politik, dan Pembangunan*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Sjamsuddin, H. (1996). *Metodologi Sejarah*. Jakarta: Depdikbud Proyek Pendidikan Tenaga Akademik.
- Sjamsuddin, H. (2007). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Sudharmono. (1993). *Masa Kecilku*. Jakarta: Yayasan Karsa Luhur Sejati.
- Sudharmono. (1997). *Sudharmono, S,H. Pengalaman dalam Masa Pengabdian: Sebuah Otobiografi*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Suryadinata, L. (1992). *Golkar dan Militer: Studi Tentang Budaya Politik*. LP3ES.
- Team Dokumentasi Presiden RI. (2003). *Jejak langkah Pak Harto: 16 Maret 1983- 11 Maret 1988*. Jakarta: Citra Kharisma Bunda.
- Wiharyanto, A. K. (2011). *Sejarah Indonesia: Dari Proklamasi sampai Pemilu 2009*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.